

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI
LAMPUNG**

(Studi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

NENDI PURWANTO

NPM : 1621020442

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
STRATEGI PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Studi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

NENDI PURWANTO

NPM : 1621020442

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyyasah Syar'iyah)

Pembimbing I

: Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II

: Syeh Sarip Hadaiyatullah, SHI., MHI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M**

ABSTRAK

Paham radikal secara umum diartikan sebagai suatu pemikiran yang berusaha melakukan perubahan menggunakan cara yang tidak biasa dan sering dilakukan dengan cara kekerasan. Paham radikal di Indonesia sudah ada sejak Orde Baru dan berkembang hingga sekarang. Indonesia dalam keadaan bahaya apabila paham radikal tersebut dibiarkan berkembang, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya aksi terorisme yang dijalankan berdasarkan motif iokumigy atau paham radikal yang dimiliki oleh pelaku terorisme. Permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini yaitu mengenai strategi pencegahan paham radikalisme di Provinsi Lampung.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap pencegahan paham radikalisme dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap pencegahan paham radikalisme. Metode yang dipakai pada penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

Berdasarkan penelitian dilapangan, Lampung masuk dalam kategori lima provinsi terbesar yang memiliki potensi radikalisme. Dalam hal ini strategi yang di ambil oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme dapat di lakukan yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang yang dimiliki. Karena itu strategi prioritas yang perludilakukan adalah meningkatkan peran pemerintah, TNI, Polri tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan kebangsaan dan cinta pancasila, mengoptimalkan peran serta komunitas cinta damai dan NKRI untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, serta menyiapkan aturan dan program peningkatan kegiatan toleransi keagamaan, kebangsaan dan pancasila. Tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme sudah berjalan sesuai dengan iokum Islam. Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nendi Purwanto
NPM : 1621020442
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementrian Agama Provinsi Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2021

Nendi Purwanto
NPM.162102442



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Nendi Purwanto
NPM : 1621020442
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi pada Kementrian Agama Provinsi Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.S.i.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Agama Provinsi Lampung)” disusun oleh **Nendi Purwanto**, NPM 1621020442 program studi **Hukum Tata Negara**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Kamis, 25 Maret 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

(.....)

Penguji II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji III : Dr. H. Khairuddin, M.H

(.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 1962102219930310

MOTTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu, dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah MahaPengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
(Qs. Al-Baqarah 2:143)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Darwidi dan Irlaini A.Ma.Pd) yang dengan sepenuh hati terus memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang (Wila Oktarani, S.Pd) yang terus memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.
3. Adik tersayang (Rahmat) yang selalu memberikan doa dan semangat tanpa henti.
4. Untuk keluarga besar terutama Nining, Bak Woh, Mak Woh, Orang Tua Angkatku, Mamang, Bibik, Kakang, Ayuk, serta Ponakan yang selalu memberiku Do'a dan yang telah membuka mataku untuk tetap semangat dalam perjuanganku selama Kuliah.

RIWAYAT HIDUP

1. Penulis dengan Nama Nendi Purwanto, putra kedua dari Bapak Darwidi dan Ibu Irlaini A.Ma.Pd. Dilahirkan di Pematang Danau Kecamatan Sindang Danau Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 10 Desember 1998.
2. Penulis mengawali pendidikan SD Negeri Pematang Danau, Sindang Danau, Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. Pendidikan SMP Negeri 1 Sindang Danau, Sindang Danau, Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. Pendidikan dilanjutkan di SMAYadika Baturaja, Sukaraya, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Pada Tahun 2016 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Selama menjadi Mahasiswa Penulis aktif dalam menjalankan Keorganisaian baik intra maupun extra kampus penulis juga aktif mengikuti seminar yang berkaitan dengan Hukum dan kepemimpinan selama duduk di bangku kuliah.

Bandar Lampung,.....2021

Nendi Purwanto
NPM.1621020442

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Agama Provinsi Lampung) dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Pembimbing 1 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta bimbingan

dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak. Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak. Syeh Sarip Hadaiyatullah, SHL.,MHI selaku pembimbing II yang selalu sigap dalam memberikan materi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen beserta staf dan karyawan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis di bangku kuliah sehingga selesai.
6. Staff beserta jajaran Kementerian Agama Provinsi Lampung yang telah membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
7. Untuk organisasi Extra atau intra serta organisasi daerah yang pernah dan sedang di ikuti penulis terimakasih telah mengajarkan hal hal baru serta dan telah mengajarkan arti pertemanan,kekeluargaan dan kebersamaan
8. Untuk kawan-kawan Hukum Tata Negara 2016 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terutama HTN Kelas I.
9. Untuk Bajang Squad (Nopal, Rafshan, Ilham, Nikmah, Siti, Dahliya, Sari, Ayu Ganda) yang telah berpartisipasi dan berkontribusi selama perjuanganku

10. Untuk saudari Reanita Agustin, S.H. yang selalu suport dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga menjadi teman hidup selamanya
11. Almamater tercinta Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu dan menyelesaikan Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karna keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecualinya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,.....2021

Nendi Purwanto
NPM.162102442

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Manfaat Penelitian.....	10
I. Metode Penelitian.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	16
1. Pengertian Radikalisme	16
2. Ciri-Ciri Radikalisme	22
3. Tujuan Paham Radikalisme.....	24
4. Radikalisme Dalam Berbagai Perspektif.....	24
5. Faktor Yang Mempengaruhi Paham Radikalisme	29
6. Pengaturan Paham Radikal Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia	33
7. Konsep Negara Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme di Indonesia	36
8. Radikalisme Menurut Islam	39
9. Strategi untuk mencegah paham Radikalisme	45
B. Tinjauan Pustaka	48
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Provinsi Lampung	52

B. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.....	60
C. Strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam pencegahan paham Radikalisme.....	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme	68
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASA TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung)”**. Maka penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan satu persatu atau perkata yang penulis ingin teliti, menurut penulis makna atau maksud dari judul skripsi diatas adalah sebagai berikut:

1. Analisis fiqh siyasah merupakan suatu upaya untuk menganalisa ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.¹
2. Strategi pencegahan paham radikalisme adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah paham radikalisme dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai.²
3. Provinsi Lampung adalah provinsi paling selatan di pulau Sumatra, Indonesia, dengan ibu kota Bandar Lampung, provinsi Lampung memiliki 13

¹ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17

² Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), h. 23

kabupaten. Provinsi Lampung secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

4. Kementerian Agama Provinsi Lampung adalah suatu kementerian yang berada di Provinsi Lampung yang mengedepankan nilai budaya kerja yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai radikalisme di Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis karena banyaknya fenomena di kalangan masyarakat tentang tindakan radikalisme, dan provinsi Lampung termasuk dalam zona merah perkembangan radikalisme terorisme. Sehingga dibutuhkan strategi untuk mencegah paham radikalisme, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait strategi pencegahan paham radikalisme.

2. Alasan Subjektif

- a. Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, serta disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari.
- b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Dalam hal ini beberapa ciri dapat dilihat dari adanya sikap intoleran, fanatic, eksklusif, dan revolusioner. Radikalisme adalah sesuatu yang muncul di Indonesia dikarenakan adanya perubahan tatanan sosial dan politik. Setelah kehadiran orang-orang Arab dari Hadramaut Yaman ke Indonesia telah membawa suatu ideologi baru ke tanah air yang kehadirannya dapat mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang mereka bawa merupakan ideologi yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.³

Di Negara Indonesia, fenomena mengenai radikalisme semakin terlihat nyata. Dalam analisisnya Sidney Jones jumlah mereka minoritas, dan lebih sedikit

³ Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropitas (*Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Volume 9 Nomor 2 Desember 2015), h. 253-268.

dari mereka yang menggunakan kekerasan.⁴Radikalisme agama terjadi pada 1950 yang ditandai dengan munculnya suatu gerakan Darul Islam. Akan tetapi, pada tahun 1962 gerakan DI/TII dapat dipatahkan oleh pemerintah Indonesia namun gerakan ini sudah terlanjur mendapat simpati dan dukungan dari sebagian kalangan umat Islam di Indonesia. Oleh karenanya, para aktivis yang tidak tertangkap menjadi embrio untuk menggerakkan lagi tradisi radikalisme di Indonesia.⁵Nampaknya kemunculan DI/TII tidak bisa ditutupi lagi. Setelah ada yang lolos, mereka mendirikan Darul Islam dan berada di kota Solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.⁶

Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak hanya dari dalam melainkan juga dibarengi dengan adanya infiltrasi dari luar seperti gerakan Wahabi mulai tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Natsir. Melalui organisasi yang dibangun Natsir yakni Dewan Dakwah Islam Indonesia telah berhasil memberikan banyak beasiswa untuk mahasiswa agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan di universitas Ibn Saud. Dalam perkembangannya, DII telah bekerjasama dengan universitas tersebut untuk mendirikan Lembaga Pengetahuan Bahasa Arab-LPBA atau lebih dikenal LIPIA.⁷ Salah satu lulusan yang terkenal dari LIPIA adalah Ja'far Umar Thalib, pendiri dan pimpinan Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal-Jamaah (FKAWJ) dan dari fenomena Darul Islam dan LIPIA

⁴ Sahri, *Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam* (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016), h. 235-240.

⁵ Zulfadli, *Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia* (Jurnal Akademika Volume 22 Nomor 1 Januari 2017), h. 178-186.

⁶ Greg Barton in *The Combating at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia*, Scott (ed) Southeast Asia Project 2009, h. 34-35

⁷ *Ibid*, h.36.

menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya Islam radikal di Indonesia, baik secara struktural maupun kultural.

Pada era ini sesungguhnya tumbuh kelompok baru seperti DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok lainnya yang sering disebut radikal dimana keberadaannya waktu itu sebagai jamaah Islam underground.⁸ Kelompok baru ini melakukan perjalanan ke berbagai kota demi mewujudkan cita-cita mendirikan negara berdasarkan syariat Islam di Indonesia. mereka melakukan jihad terlarang dari bawah tanah dengan melakukan rekrutmen anggota serta melakukan aksi-aksi diberbagai wilayah melalui kaderkadernya sampai pada akhirnya diketahui oleh publik bahwa kelompok baru ini naik ke panggung politik.

Selanjutnya historisitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar. *Pertama* perkembangan di tingkat global dimana kelompok- kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Apa yang terjadi di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Syiria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. *Kedua*, terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah

⁸Haedar Nasir, *Islam Syariat Edisi Revisi* (Jakarta: Mizan, 2014), h. 282.

kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarginalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan paham radikalisme ini tidak muncul begitu saja secara terang-terangan namun melalui cara yang lebih tidak terlihat seperti melalui kegiatan-kegiatan social, kegiatan kampus, pemberian bantuan dana dengan memberikan paham radikalisme, melalui internet, dan jalan-jalan lain yang tidak terlalu frontal namun dapat memberikan paham tersebut sehingga diterima beberapa masyarakat di Indonesia.

Tentu hal ini perlu diwaspadai mengingat paham radikalisme sarat akan kekerasan dan intoleransi sehingga perlu adanya penanggulangan yang dapat mencegahnya terlebih Islam yang sebenarnya adalah Islam yang damai. Selain itu, system pencegahan dan pengembangan deteksi dini untuk mencegahnya sebaiknya dilakukan dengan cara yang kreatif karena mereka juga menyebarkan ajarannya dengan cara yang kreatif pula.⁹

Jika paham radikalisme terus berkembang maka dapat mengganggu konstitusi Negara. Hakikat konstitusi adalah sangat penting karena merupakan suatu kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat Negara, kesepakatan hukum, dan kesepakatan tentang institusi serta mengenai prosedur

⁹ Radha Widyaningsih dkk, *Kerentanan Radikalisme Agama di Kalangan Anak Muda*, (Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper: Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, November 2017), h. 1553-1587.

ketatanegaraan.¹⁰ Dalam hal ini, fiqih siyasah dapat menjadi salah satu aspek hukum Islam yang didalamnya membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam Al-Quran tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan Negara bahkan istilah Negara tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tetapi unsure-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalamnya seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan.¹¹

Telah banyak ulama dan pakar undang-undang yang ada dalam konstitusional menyatakan bahwa musyawarah adalah suatu kewajiban umat Islam dan dalam prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum serta suatu dasar yang baku telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Quran dan Hadits.¹² Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam adalah dengan bermusyawarah. Islam telah memberikan batasan-batasan yaitu tidak boleh melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan adanya larangan berijtihad atas apa yang dilarang kecuali sesuatu yang tidak dilarang seperti yang tertuang dalam QS. Al-Imran : 15 yang berbunyi:

قُلْ أُوْنِبُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ دَلِكُمْ ؕ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝

¹⁰ Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 36

¹¹ Mujaer Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 13

¹² Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam Edisi revisi* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2006), h. 34-37

"Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.¹³

Konsep keadilan dalam Islam yaitu penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam menetapkan hukum harus seadil-adilnya. Dalam kenegaraan, konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim dalam Negara Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang membedakan mereka hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Sehingga tidak dibenarkan pemaksaan untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu dan tidak toleransi terhadap agama lain. Sehingga baik dalam Al-Quran dan dalam kenegaraan terutama di Indonesia, paham radikalisme merupakan sesuatu yang harus ditanggulangi.

Banyak sekali fenomena yang terjadi di provinsi Lampung terkait dengan radikalisme tersebut salah satu contohnya adalah penangkapan 2 orang terduga teroris asal kecamatan wayratai kabupaten Pesawaran, Kamis 12/7/2018. Kedua pelaku yaitu Sarifudin Munir warga dusun sidorejo kecamatan wayratai dan Wahono warga dusun candisari, desa Gunungrejo kecamatan wayratai. Keduanya diamankan atas dugaan memiliki keterkaitan dengan jaringan *"Jamaah Ansharut Daulah (JAD)"* pimpinan Aman Abdurahman yang diperkirakan berafiliasi dengan ISIS.

¹³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan (QS Al imron 15)*, Jakarta : PT Syamil cipta Media, 2006, h.80

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Provinsi Lampung (Studi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung).

D. Fokus Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mencari hal yang baru, penelitian akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian kepada area yang diteliti. setelah fokus penelitian ditentukan maka akan di tentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian adalah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Provinsi Lampung (Studi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung).

E. Rumusan Masalah

Permasalahan yang di ajukan berdasarkan uraian dari latar belakang belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap pencegahan paham radikalisme?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap pencegahan paham radikalisme?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap pencegahan paham radikalisme.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap pencegahan paham radikalisme.

G. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme di Provinsi Lampung. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya. Dan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan didalam tabel dibawah ini:

1. Penelitian Saifuddin 5 tahun terakhir dengan judul “Radikalisme Islam di kalangan mahasiswa (sebuah metamorfosa baru)” UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang anggapan bahwa kelompok Islam militant diikuti oleh kalangan awam mulai disadari kalangan fundamentalis. Pilihan kelompok mahasiswa sebagai agen baru dianggap mampu merubah pola gerakan. Merebaknya kelompok radikal Islam di kalangan mahasiswa tidak terlepas dari upaya kaderasi kelompok intelektual kalangan fundamentalis Islam. Strategi yang dilakukan adalah indokrinasi ideologis yang membuat mahasiswa sulit berpisah dari kelompok ini. Fenomena ini akhirnya membentuk metamorfosa baru gerakan Islam radikal di kampus.¹⁴

2. Penelitian Raden Ajeng Annisa Nurbito, karya 5 tahun terakhir dengan judul “Radikalisme dalam aksi pergerakan lingkungan: Studi kasus terhadap Earth Liberation Front, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik departemen ilmu hubungan internasional masyarakat transnasional. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mencari alasan-alasan mengapa ELF tetap menggunakan metode radikal dalam aksi langsungnya. Untuk mendapatkan jawaban tersebut penulis menggunakan tiga konsep utama yakni civil disobedience, violence and terrorism oleh Peter Singer, hipotesis Gaia oleh James Lovelock dan radikalisme baru dalam pergerakan sosial oleh David Solnit.¹⁵

3. Penelitian Maulidah Rohmatika karya 5 tahun terakhir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Efektifitas Peran Guru

¹⁴ Skripsi Saifuddin, *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah metamorfosa baru)*, UIN Sunan Kalijaga, (2011).

¹⁵ Skripsi Raden Ajeng Annisa Nurbito, *Radikalisme dalam aksi pergerakan lingkungan: Studi kasus terhadap Earth Liberation Front*, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Indonesia, (2012).

PAI di SMP Negeri 9 Yogyakarta dalam upaya preventif menangkal propaganda radikalisme Islam pada peserta didik”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Efektivitas peran guru dalam upaya preventif menangkal radikalisme Islam pada peserta didik menunjukkan taraf tercapainya tujuan guru dalam menangkal radikalisme pada peserta didik. Hal tersebut terwujud dari peserta didik memahami bahaya radikalisme, sikap terbuka dan tidak fanatik dalam beragama, menolak tindakan kekerasan atas nama agama, bersikap toleran, menjunjung tinggi perdamaian dan menganjurkan persatuan dan memiliki jiwa nasionalisme.¹⁶

4. Nala Aula Rabba, karya 5 tahun terakhir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Peran guru pendidikan Agama Islam dalam upaya mencegah radikalisme di SMA Khadijah Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan penelitian ini memfokuskan pada upaya yang dilakukan guru pendidikan Agama Islam dalam mencegah radikalisme di SMA Khadijah Surabaya serta kontrol dari guru pendidikan Agama Islam terhadap perkembangan perilaku siswa. Hasil penelitian ini yaitu upaya strategi guru pendidikan Agama dalam menangkal paham radikalisme ada tiga yakni melalui pengembangan kurikulum, penguatan pendidikan karakter dan kegiatan non akademik serta dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal di sekolah, guru pendidikan agama Islam melakukan kontrol terhadap

¹⁶ Skripsi Maulidah Rohmatika, *Efektifitas Peran Guru PAI di SMP Negeri 9 Yogyakarta dalam upaya preventif menangkal propaganda radikalisme Islam pada peserta didik*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

pengembangan dan perilaku siswa, hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti kontrol bahan ajar, buku, buku bacaan di perpustakaan, situs-situs yang bisa dan tidak bisa di akses siswa, pendampingan dalam setiap kegiatan dan pembentukan kultur sekolah. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Jika peneliti sebelumnya berlokasi di wilayah pulau Jawa sedangkan peneliti yang akan penulis lakukan adalah di provinsi Lampung khususnya di Kementerian Agama provinsi Lampung. Perbedaan yang lainnya dapat dilihat dari bidang kajiannya, jika peneliti sebelumnya membahas tentang 1) Keefektifitas peran guru PAI di SMA, 2) Peran Kiai dalam radikalisme di pondok pesantren, 3) Fenomena radikalisme gerakan ISIS di Indonesia, 4) Peran guru PAI dalam mencegah radikalisme di SMA. Maka dalam penelitian ini penulis terfokus pada strategi kementerian Agama provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme.¹⁷

I. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat

¹⁷ Skripsi Nala Aula Rabba, *Peran guru pendidikan Agama Islam dalam upaya mencegah radikalisme di SMA Khadijah Surabaya*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang strategi pencegahan paham radikalisme di Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana strategi untuk mencegah paham radikalisme di provinsi lampung di pandang dari Fiqh Siyasah.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, dalam hal ini wawancara dengan sejumlah Karyawan Kementrian Agama Provinsi lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau Instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya asli. Data sekunder

yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.¹⁸ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁹ Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme.

b. Interview

Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰ Yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pada prakteknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung pada pihak-pihak yang akan di interview.

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015), h. 105

¹⁹ Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011), h. 118

²⁰ Nasution, S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet. Ke-XIV (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). h. 113.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.²¹ Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun oleh seorang lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²² Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan sejumlah karyawan di Kementerian Agama Provinsi Lampung yang semuanya berjumlah 180 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya

²¹P. Joko, Subagiyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004) h. 106.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 53

mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi sampel didalam penelitian ini 4 orang yang terdiri dari pimpinan dan karyawan di Kementerian Agama Provinsi Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

- a. Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.²⁴
- b. Sistematik data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

7. Metode Analisis Data

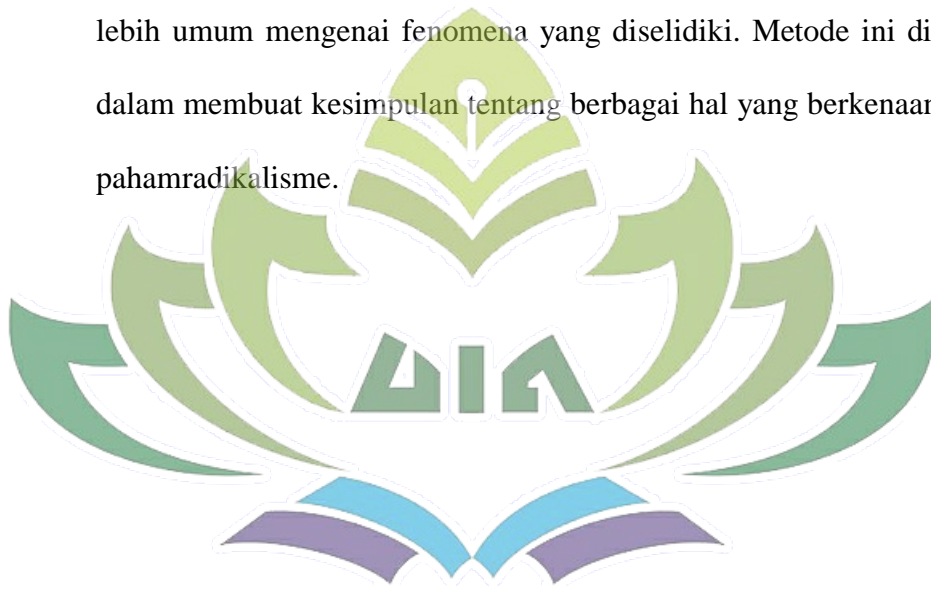
Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pencegahan paham radikalisme dalam pandangan Fiqh Siyasah, yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif.²⁵

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015) h. 115.

²⁵*Ibid*, h. 182.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman tentang pencegahan paham radikalisme dalam mengacu pada pandangan Fiqh Siyasah.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan paham radikalisme.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Paham Radikal

1. Pengertian Radikalisme

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang mampu mengerakkan massa, bahkan Agama yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bahkan mampu mengangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dan direlevansikan dalam berbagai wacana hingga tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham hingga timbul kekerasan, anarki bagi kelompok yang tidak sepaham. Di dalam umat Islam sejak dahulu seperti ini, kita mengenal kaum Khawarij yang membawa kekerasan bagi kelompok yang tidak sepaham dengan kelompok mereka sampai melakukan pembunuhan terhadap musuh yang tidak seideologi dengannya. Sejarah berulang, pada awal munculnya peradaban Islam pun, berbagai teror dan anarkisme telah muncul seiring dengan munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij. Sebagai contoh misalnya seruan salah satu tokoh Khawarij bernama al-Mustaurid bin Sa'ad, salah seorang tokoh Khawarij kepada Sammak Bin Ubaid Al-Abasi, tokoh Khawarij tersebut berkata "kami membenci kepada siapa saja yang tidak bertaklim kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kami meminta agar semua orang melepaskan diri dari kepemimpinan Abu Bakar, Umar,

Utsman dan Ali, karena mereka telah keluar dari tahkim Allah”. Pada dasawarsa abad ke 20 hingga abad 21, muncul istilah baru yang menunjukkan bentuk fundamentalisme antara lain Neo-Khawarij, berakar pada kondisi masa lalu di dalam tubuh umat Islam sejak 1300 tahun lalu, pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw, kemunculan berbagai kelompok yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Khawarij dalam bahasa Arab artinya adalah keluar. Definisi tersebut terkait dengan kelompok yang memisahkan diri dengan kelompok pendukung Ali. Serangkaian kekerasan, anarki, hingga upaya pembunuhan kerap dilakukan oleh kelompok ini hingga membuat terbunuhnya tokoh tokoh Islam pada masanya. Kita mengenal peristiwa dalam sejarah, pada suatu Subuh, 14 Ramadan 40 H, tiga orang yang merencanakan pembunuhan terhadap tiga orang tokoh penting kaum muslim di Makkah ketika itu, berusaha mencari saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan. Mereka adalah tokoh Khawarij bernama Amr bin Bakr, dan Abdurrahman bin Muljam dan barak bin Abdullah yang semuanya merupakan anggota dari kaum Khawarij, kelompok yang keluar dan memisahkan diri dari muslim, yang tidak puas dengan kepemimpinan umat ketika itu. Mereka pada awalnya adalah pengikut dari salah seorang dari tiga pemimpin yang sedang mereka rencanakan pembunuhannya itu, yakni Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah pada saat itu memimpin umat, tetapi mereka tidak setuju pada kesediaan sang khalifah untuk menerima tahkim (arbitrase) antara sang khalifah dengan musuhnya, Mu’awiyah, melalui orang yang

ditunjuknya, yakni Amr bin Ash. Mereka juga menilai Mu'awiyah sebagai pemberontak terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hingga akhirnya melalui aksi radikal yang dilancarkan oleh mereka membuat kepemimpinan khalifah ke 4 tersebut berakhir. Rasulullah pernah menerangkan bahwa akan muncul di kemudian hari (setelah zaman rasul) keturunan-keturunan orang-orang yang melampaui agama. Dalam kaitannya dengan itu, para ulama menafsirkannya dengan kelompok Khawarij. Rasulullah pernah menerangkan dan menggambarkan ciri-ciri kelompok ini, yakni “sesungguhnya akan keluar suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. mereka akan keluar sebagaimana keluarnya anak panah dari bucuannya. Sekiranya aku menemuinya pasti aku akan membunuhnya sebagaimana membunuh kaum Ad. (H.R. Bukhari dan Muslim). Para ulama memberikan penafsiran bahwa Hadis yang dimaksud adalah kelompok Khawarij tersebut. Karena seperti penggambaran dalam sejarah, kaum Khawarij tidak takut jika menumpahkan darah sesama muslim, hanya karena perbedaan dalam hal pemikiran dan ibadah. Para peneliti barat menyatakan golongan ini sebenarnya melakukan protes terhadap sistem sosial. Bukan hanya yang berkenaan dengan masalah akidah, ibadah dan pemikiran. Tetapi mereka sebenarnya mempunyai kekecewaan yang mendalam terhadap sistem sosial. Kondisi masyarakat sehingga kelompok mereka cenderung tidak

terikat dengan sistem sosial yang ada dan mengelusifkan kelompok mereka. Kelompok Khawarij juga tidak menengdepankan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara. Padahal Nabi dan para sahabat pada masa dahulu mengedepankan jalan musyawarah dan perundingan dalam memecahkan suatu perkara. Bahkan ketika dalam suasana perang sekalipun dengan kafir Quraisy dan orang-orang kafir, Nabi tetap berupaya menyelesaikannya dengan cara berunding. Seperti tampak pada perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Tetapi kaum Khawarij lebih memilih cara yang radikal dalam menyelesaikan suatu perkara. Pembunuhan terhadap sahabat Nabi pada era awal peradaban Islam adalah contoh konkretnya. Kaum Khawarij hanya percaya pada kelompoknya saja dan membantah bahwa para ulama yang tidak sejalan dengan mereka adalah kafir. Bahkan halal daranya boleh dibunuh. Hal itu tampak sejak kemunculan pemahaman kelompok ini pada masa khulafaurrasyidin. Hingga memasuki abad ke 21 ini muncul istilah terminologi Neo-Khawarij, artinya adalah Khawarij dengan gaya baru tetapi dengan pemahaman fundamentalisme yang sama. Gerakan Neo Khawarij tersebut mirip dengan gerakan yang ada sejak awal kemunculan Islam, yakni mengkafirkan kelompok yang berbeda dari mereka, bahkan mengatakan bahwa kelompok yang berbeda dengan mereka adalah halal darahnya. Ideologi takfiri ini seperti kemunculan kelompok yang disebut ISIS. Kelompok ISIS termasuk daftar yang mengkafirkan semua golongan yang enggan untuk menerima otoritas ISIS. Menurut ISIS

muslim yang melakukan baiat terhadap mereka akan terselamatkan dan yang enggan akan diidentifikasi murtad dan boleh dibunuh. Sesungguhnya pemahaman Khawarij bukan berdasarkan pada “kelompok” semata. Tetapi juga termasuk pada pribadi pemikiran seseorang. ISIS bukanlah salah satunya, sejarah telah membuktikan banyaknya kelompok lainnya yang juga berada memiliki pola aktifitas dan pemikiran yang sama. Faktor utama munculnya radikalisme dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri dan pemahaman literalistik atas teks-teks agama. Al-Qur'an telah digunakan muslim untuk menunjukan perilaku, menjustifikasi tindakan melalui peperangan. Menurut Yusuf Qardhawy (2014) bahwa radikalisme dikaitkan dengan sikap berlebihan seseorang terhadap agama, antara perilaku dan agama tidak sesuai, antara agama dan politik, antara agama dengan politik, antara hukum yang dicanangkan oleh Allah swt dengan produk hukum manusia itu sendiri. Munculnya berbagai macam kelompok Islam adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Karena pada saat itu tidak ada wacana untuk mempertanyakan suatu peristiwa. Jika Nabi Muhammad eksis dan hadir di tengah umat tentu umat Islam langsung menanyakan perihal suatu peristiwa kepada Nabi. menggambarkan bahwa radikalisme merupakan bentuk ekstrem dari revivalisme. Revivalisme dalam keIslaman yang lebih berorientasi ke dalam atau inward oriented, dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri

pribadi. Adapun bentuk revivalisme yang cenderung berorientasi keluar atau kadang mengharuskan kelompok lain agar sesuai dengan keyakinan mereka disebut sebagai Tindakan Radikalisme.

Secara etimologis kata radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang mempunyai makna “akar” dan istilah ini digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal.²⁶ Kemudian dalam bahasa Inggris kata *radical* bermakna ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.²⁷

Diawali dari pendapat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa terorisme merupakan benih lahirnya terorisme, radikalisme juga disebut sebagai suatu sikap yang menambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.²⁸

Selanjutnya menurut pendapat Ahmad Rubaidi, dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* bahwa radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Pada sudut pandang keagamaan, radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak

²⁶ Pengertian Radikalisme melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_\(sejarah\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_(sejarah)), diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 919

²⁸ BNPT, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, (Jakarta: BNPT, 2012), h. 1

secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.²⁹

Menurut pendapat Agus Surya Bakti radikalisme dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu melalui pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya baik di bidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi.³⁰

Definisi lain juga dijelaskan oleh Zuly Qadir, radikalisme juga terkadang diartikan sebagai Islamisme. Islamisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern, agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi.³¹

Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa ide, asumsi, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap

²⁹ Ahmad Rubaidi, *Radikalisme Islam: Nahdatul Ulama' masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pusaka, 2007), h. 33

³⁰ Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), h. 155

³¹ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.

keberlangsungan keadaan yang ditolak. Sesederhananya, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.
- b. Sikap fanatik, yaitu sikap selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain adalah salah.
- c. Sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan.
- d. Sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Definisi lain juga dijelaskan oleh Zuy Qadir, radikalisme juga terkadang diartikan sebagai Islamisasi, Islamisasi sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern. Agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi.³² Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis, suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham dengan adanya unsur politik.

Umat Islam Indonesia sering dihadapkan dengan kehadiran sejumlah gerakan keagamaan yang telah lama mapan seperti Naudatul Ulama dan

³² Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.

Muhammadiyah. Gerakan ini biasa disebut dengan istilah Islam fundamentalis, Islam rasikal dan Islam militant. Meski berbeda istilah tetapi memiliki ciri-ciri yang sama yaitu sama-sama dogmatik, kaku dalam penafsiran teks-teks suci, pandangan yang radikalisi, serta sikap dan tindakan di masyarakat mudah mengkafirkan kelompok lain yang tidak sehaluan.³³ Tarmizi tahir mengemukakan radikalisme agama adalah gerakan dari suatu kelompok muslim tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada dan berusaha mendirikan tatanan sendiri yang berbasis nilai-nilai ajaran agama Islam fundamental, yaitu Al-qur'an, Hadist dan praktik kehidupan sahabat nabi generasi pertama.³⁴

Islam radikal terbagi menjadi dua makna yaitu, wacana dan aksi. Radikal dalam wacana diartikan dengan pemikiran untuk mendirikan agama Islam atau kekhalifahan Islam, sedangkan dalam aksi diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan yang mengatas namakan agama. Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut:

- a. Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
- b. Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya.³⁵

³³ Zulqodir, *Radikalisasi Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 154

³⁴ Rauf Fathurrahman, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol 12 No. 3, h. 597

³⁵ Natalia Angga, "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologis Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia)", *Jurnal Al-Adyan* Vol. 11 No. 1, h. 9

Di Indonesia fenomena radikalisme semakin terlihat nyata. Sidney Jones dalam analisisnya bahwa jumlah mereka minoritas, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan kekerasan. Greg Barton juga menambahkan bahwa radikalisme agama terjadi pada decade 1950 yang ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam. Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak hanya dari dalam melainkan juga dibarengi dengan adanya infiltrasi dari luar yaitu yang ditunjukkan oleh Barton bahwa gerakan Wahabi tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Natsir, melalui gerakan organisasi yang dibangun Natsir yakni dewan dakwah Islam Indonesia berhasil memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Ibn Saud.³⁶

Radikalisme tidak bisa disamakan dengan terorisme, radikalisme dan terorisme sangatlah berbeda. Radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme, sedangkan terorisme sendiri adalah bentuk aksinya. Ahmad Syafii Maarif bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keagamaan seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan criminal untuk tujuan-tujuan politik. Sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme, pada umumnya para terorisme yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan.

³⁶*Ibid*, h. 92

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan paham atau ideology yang menuntut adanya perubahan dan pembaharuan sistem politik dan sosial dengan cara kekerasan sehingga kelompok yang menganut paham ini dalam mencapai tujuan tertentu selalu menggunakan kekerasan.

2. Ciri-Ciri Radikalisme

Radikalisme yang sering diartikan sebagai paham yang menghendaki suatu perubahan yang menggunakan cara kekerasan dan pandangan yang dimiliki paling benar dan menganggap orang lain salah sehingga terjadi kecenderongan pada satu pemikiran atau satu kelompok saja. Guru besar UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahrin Harahap M.A menyatakan bahwa radikalisme memiliki ciri-ciri yang mencolok dan mudah dikenali. Ciri-ciri yang disebutkan oleh guru besar tersebut adalah sempit, fundamental, eksklusif, keras, selalu ingin mengoreksi paham orang lain.

Orang yang memiliki paham radikalisme memiliki sifat yang sangat tertutup, otoritas pengetahuan yang dimiliki dikaitkan dan diperoleh oleh figure tertentu yang dinilai tidak dimiliki orang lain. Sehingga, kaum radikalisme tidak menerima figure lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Berikut adalah ciri-ciri paham radikalisme.³⁷

- a. Intoloren, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.

³⁷ Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Teroris-Isis, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), h. 4

- b. Fanatik, artinya selalu merasa benar sendiri, dan selalu menganggap orang lain salah.
- c. Eksklusif yaitu membedakan diri dari masyarakat umumnya.
- d. Revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.

Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme yaitu:

- a. Menjadikan Islam sebagai ideology final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan.
- b. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadist hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokasi kekinian.
- c. Karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadist, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal Karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*.
- d. Menolak ideology non Timur Tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalism.
- e. Gerakan kelompok ini sangat bersebrangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.³⁸

Menurut Abdurrahman Mas'ud kelompok radikalisme memiliki ciri-ciri:

³⁸ Munip Abdul, *Menangkal Radikalisme di Sekolah*, (Jurnal pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2), h. 162

- a. Memperjuangkan Islam secara kaffah, syariat Islam sebagai hukum Negara.
- b. Mendasarkan praktek keagamaanya pada orientasi masa lalu (salafy).
- c. Cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisme dan modernism.
- d. Perlawanan terhadap liberalism Islam yang tengah berkembang di Indonesia.³⁹

3. Tujuan Paham Radikalisme

Paham radikalisme memiliki tujuan yaitu mengadakan perubahan untuk merealisasikan paham mereka dan selalu menggunakan cara kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Selain itu, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar Negara. Mengganti ideology Negara dengan ideologi kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal nasional, regional atau internasional serta ingin memperoleh pengakuan politis bahwa merupakan badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

Berdasarkan tujuan radikalisme diatas dapat disederhanakan bahwa tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan yang dilakukan sampai keakarnya menggunakan kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada.

³⁹ Darmawati dan Thalib Abdullah, *Respon Siswa Madrasah (MAN) terhadap Radikalisme Agama di Makassar*, (Jurnal Sulesna, Vol. 10 No. 1, 2016), h. 26-31

4. Radikalisme Dalam Berbagai Perspektif

Melihat apa yang telah dipaparkan secara sederhana dalam bab pendahuluan, kiranya tidaklah mengherankan jika banyak kalangan (ahli hukum, sosiologi, politikus, ekonomi, budayawan dan rohaniawan), meskipun bukan objek utamanya, tertarik pada radikalisme dan menjadikan radikalisme sebagai salah satu fokus pembicaraan atau kajiannya. Hanya yang membedakan antara satu kajian dengan kajiannya adalah objek formalnya saja, sedangkan objek materialnya adalah sama yaitu radikalisme.⁴⁰

Jika dilihat dari sisi lain, tertariknya banyak kalangan terhadap radikalisme ini juga dikarenakan adanya gerak konvergensi ilmu pengetahuan, menjadikan pembahasan suatu ilmu pengetahuan tidak lagi terikat secara kaku dalam batas-batas formal yang telah disepakati, tetapi mengarah pada digunakannya perspektif lain dalam melihat persoalan objek materialnya.

Menyadari akan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan melihat radikalisme dari berbagai perspektif, terutama dalam perspektif politik, sosiologi, budaya, ekonomi dan agama, serta melakukan refleksi masing-masing perspektif dalam tataran objek formal dengan tetap mengakui terjadinya konvergensi ilmu pengetahuan seperti yang tersebut di atas.

1. Radikalisme dalam Perspektif Politik

Berbicara masalah radikalisme, maka pertama yang tergambarkan adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana

⁴⁰ C.Verhaak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, (Cet. Ke-IV : Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.1

sesungguhnya radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi. Pemahaman ini kiranya tidaklah berlebihan, dan tidak salah, sebab memang dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari pendapat atau asumsi tersebut di atas. Namun semenjak tahun 1945, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, pembedaan secara ketat dan kaku tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi seiring dengan adanya berbagai perubahan masyarakat secara mondial. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat secara ketat itu semakin kurang mampu menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang bukan sekedar melibatkan berbagai lintas disiplin ilmu atau multi disipliner, tetapi juga lintas disiplin atau interdisipliner. Tidak jauh berbeda antara pendapat atau asumsi tersebut di atas, dengan membawa persoalan radikalisme dalam domain politik karena hanya politiklah dinilai satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan secara eksplisit mengembangkan berbagai teori, dan pandangan tentang bagaimana radikalisme sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan guna merebut dan mempertahankan

kekuasaan yang ada, terutama teori politik yang dikembangkan pada abad pertengahan, serta teori politik Marxian dan Sosialis.

2. Radikalisme dalam Kehidupan Sosial

Ilmu pengetahuan sosiologi secara formal mencoba membatasi diri pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok/masyarakat, serta bagaimanakah individu paling efektif diawasi oleh masyarakat), serta “perubahan-perubahan sosial (social change) sebagai objek formalnya”. Mengingat sifatnya yang “nomografis”, pembicaraan radikalisme dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan radikalisme dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang diamati, dan tidak bermaksud untuk “menyusun suatu kerangka teori guna dijadikan alat atau kerangka bertindak bagi keperluan dan kepentingan praktis sebagaimana yang dipahami oleh ilmu politik”.

3. Radikalisme dalam Perspektif Budaya

Pembicaraan radikalisme pada tataran budaya tidak kurang menariknya, jika dibandingkan dengan perspektif lain. Apalagi penelusuran radikalisme dari perspektif budaya seakan membawa, dan menghantarkan pada realitas ditemukannya berbagai budaya dalam

masyarakat, dan etnis tertentu yang dianggap akrab dengan radikalisme, sehingga sering dinilai merupakan bagian dari sistem budaya mereka.

4. Radikalisme dalam Perspektif Ekonomi

Meskipun bukan objek formalnya, wacana radikalisme juga tidak luput dari perhatian bidang ekonomi, terutama pada upaya pemahaman sampai sejauhmana pembangunan ekonomi, serta implikasi sistem ekonomi yang digunakan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki terhadap masyarakat itu sendiri.

5. Radikalisme dalam Perspektif Agama

Pembicaraan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, hampir semua orang sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah agar penganutnya untuk melakukan tindakan terorisme. Jika ada yang mengajarkan hal yang demikian, maka keberadaan agama dinilai telah mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian baik dunia maupun akhirat. Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat berbagai ajaran, simbolisme, cerita atau amsal, konsep, dogma, pencitraan, ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang dikehendakinya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik manusia. Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat

universal, sedangkan jika menyangkut bagaimana simbol, konsep, ritualitas dan idealitas yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka “agama menjadi bersifat partikular”. Mengingat sifatnya yang universal maka agama memperlihatkan dimensi Illahiyah, sedangkan pada yang partikular bisa merupakan cerminan dan refleksi budaya lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika agama memiliki fungsi yang sakral dan ditempatkan sebagai suprastruktur dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat tersebut, dan menyentuh sisi eksistensialisme manusia itu sendiri.⁴¹

5. Faktor Yang Mempengaruhi Paham Radikalisme

Menurut Muhammad A.S Hikam dalam bukunya *Deradikalisasi* mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu “aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan”.⁴²

1. Faktor Geografi

Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dann merupakan negara kepulauan,

⁴¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, (Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985), h. 77

⁴² Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), h. 128-132.

perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Daerah-daerah pulau terluar dan perbatasan masih sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Terutama sebagai basis untuk melakukan prekrutan dan pelatihan serta pos-pos penyelundupan senjata serta ponsel mereka. Oleh sebab itu, Indonesia harus benar-benar memperhatikan wilayah-wilayah tersebut, selain wilayah-wilayah yang sudah menjadi basis operasi kelompok radikal selama ini.

2. Faktor Demografi

Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (*schools of thought*) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.

3. Faktor Sumber Kekayaan Alam

Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.

4. Faktor Ideologi

Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan

degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

5. Faktor Politik

Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check and balances sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya Destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan (Pressure Groups). Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dikendalikan, akan sulit bagi pemerintah untuk dapat berkonsentrasi menangani masalah ancaman nasional berupa terorisme yang bersifat multidimensional.

6. Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik ditingkat regional maupun internasional.

7. Faktor Sosial Budaya

Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya cosmopolitan dan pop (popular culture) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kawla muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan.

8. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

6. Pengaturan Paham Radikal Terorisme dalam Hukum positif Indonesia

Radikalisme merupakan istilah yang sekarang ini sudah jarang digunakan, khususnya pada dunia Internasional. Pada tahun 2014, resolusi 2178 yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait langkah pencegahan penyebaran terorisme, yang isinya justru tidak menyebut istilah Paham Radikal Terorisme maupun Radikalisme tetapi dengan istilah baru yaitu Countering incitement dan Violent Extremism, tindakannya disebut Countering Violent Extremism.

Indonesia dalam menyempurnakan hukum positif terkait terorisme beserta pencegahan tindak pidana terorisme memilih menggunakan istilah paham radikal terorisme. Paham radikal terorisme baru diatur pada Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana UU tersebut merupakan hasil revisi dari UU No.15 tahun 2013 (UU Terorisme yang lama). Berbeda dengan Indonesia, United States Agency for International Development (USAID) atau dalam Bahasa Indonesia adalah Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika tidak menggunakan istilah paham radikal terorisme, melainkan menggunakan istilah Violent Extremism.

Menurut definisi USAID tersebut Violent Extremism dapat diartikan sebagai perbuatan mengadvokasi, terlibat dalam, mempersiapkan, atau mendukung kekerasan yang bermotivasi ideologis atau dibenarkan untuk tujuan sosial, ekonomi atau politik lebih lanjut. Sedangkan Public Safety Canada yang merupakan Departemen Keamanan Publik dan Kesiapsiagaan

Darurat Negara Kanada mendefinisikan violent extremism sebagai, violent extremism merupakan proses mengambil pandangan radikal dan menempatkan mereka ke dalam tindakan kekerasan, mempromosikan atau terlibat dalam kekerasan sebagai cara untuk memajukan pandangan politik, ideologis, atau keagamaan radikal mereka.⁴³

Indonesia baru mengatur terorisme pada tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pada UU yang mengatur terorisme tersebut belum diatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme, selain itu juga istilah paham radikal terorisme belum muncul pada peraturan tersebut. Paham radikal juga tidak diatur pada produk hukum yang ada di Indonesia. Paham radikal baru muncul pada UU No.5 Tahun 2018. Dalam UU No.5 tahun 2018, istilah paham radikal terorisme disebutkan pada bagian pencegahan tindak pidana terorisme.

Istilah tersebut muncul pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pasal 43C ayat (1) mengatakan bahwasanya Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa paham radikal terorisme merupakan

⁴³ Ahmad Asrori, 2015, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historis dan Antropisitas*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No.2, Desember 2015, h. 253.

tujuan utama dilaksanakannya kontra radikalisasi. Selain itu pada Pasal 43D menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

Paham radikal terorisme pada pasal tersebut kembali disebutkan dan menjadi sesuatu yang penting sehingga deradikalisasi dirasa perlu dilakukan. Mengenai istilah paham radikal terorisme tidak dijelaskan secara jelas dalam UU No.5 tahun 2018. Hal tersebut ditakutkan akan menjadi hambatan terlaksananya upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan juga ditakutkan adanya penyelewengan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Sejah ini, paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana terorisme.

Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme” adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.⁴⁴

7. Konsep Negara Dalam Menghadapi Gerakan Radikal di Indonesia

⁴⁴ Abu rokhmad, 2014, *Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang*, Journal of Social Science and Religion, Ministry of Religious Affairs, Vol 21, No.1, Juni 2014, h.27.

Konsep Negara menghadapi gerakan radikal dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

a. Menjadikan Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila diakui Negara sebagai falsafah hidup, cita-cita moral, dan ideologi bagi kehidupan berbangsa. Pancasila diyakini mampu menyaring berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi logis dari sebuah masyarakat dan bangsa yang majemuk (bhinneka). Bangsa Indonesia tidak menafikkan kehadiran budaya luar maupun ideologi luar, tapi melalui Pancasila negara dapat memilah pengaruh mana yang dapat diterima atau tidak. “Negara juga mampu menyesuaikan pengaruh luar tersebut dengan konteks budaya Indonesia ataupun menolak karena tidak sesuai dengan falsafah, cita-cita moral dan ideologi nasional”.⁴⁵

b. Menjadikan UUD sebagai Landasan Konstitusi

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis adalah landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan kemerdekaan serta dibentuknya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Landasan utama dalam kehidupan bernegara adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan semata. Para penyelenggara negara dan` warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat harus bertindak

⁴⁵ Muhammad A.S Hikam,.....h. 44.

berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Strategi untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia, penanggulangan yang dipilih harus senantiasa berlandaskan konstitusi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip utama dalam kebijakan, strategi, dan upaya-upaya yang dijalankan.⁴⁶

c. Menjadikan Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan bersama yaitu tujuan nasional. Wawasan Nusantara mengacu kepada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial budaya, serta faktor kesejahteraan, dan perkembangan lingkungan. Konsepsi yang terkandung dalam wawasan nusantara merupakan simpulan dari pengalaman masa lalu dan lingkungannya yang memiliki relevansi dan validitas dengan masa mendatang sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan interaksi antar komponen bangsa dalam hidup bersama yang bermanfaat. Makna wawasan nusantara juga sebagai konsep pemikiran bersifat inklusif dalam menerima pembaharuan dalam kehidupan Indonesia yang beraneka ragam. Oleh karenanya, wawasan nusantara turut mendukung pembangunan nasional.⁴⁷

d. Memperkuat Konsepsi Ketahanan Nasional

⁴⁶Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, 2010. h. 32.

⁴⁷Dwi Kusrahmadai, *Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2010), h. 2.

Konsepsi ketahanan nasional jika dikaitkan dengan permasalahan penanggulangan terorisme, implementasi ketahanan nasional merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik ideologi, pemikiran, gagasan, paradigma dan filsafat yang mendasarinya maupun berbagai aksi dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada masyarakat, serta wujud teror. Keuletan dan ketangguhan ini harus dimiliki oleh setiap pribadi warga negara Indonesia, keluarga, kelompok masyarakat, penyelenggara negara di pusat maupun daerah yang pelaksanaannya “diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang sinergis, sistematis, dan berkelanjutan”.⁴⁸

e. Menciptakan Kerja Sama di Wilayah ASEAN dalam Menangkal Terorisme

Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memiliki wadah pertemuan antar-Menteri Pertahanan masing-masing negara untuk membahas isu-isu pertahanan dan keamanan. Wadah tersebut dikenal dengan naman ADMM (ASEAN Defense Minister Meeting). Sebenarnya, tujuan ADMM sendiri untuk mengakomodasi kepentingan bersasma ASEAN dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

⁴⁸ Muhammad A.S Hikam, h.16.

8. Radikalisme Menurut Islam

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang berbeda. Namun memang diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah pancasila baik yang berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama, tindakan radikalisme yang padagilirannya melahirkan terorisme. Sangat jelas diuraikan dalam Al-qur'an yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Q.s Al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*⁴⁹

Makna ayat diatas adalah, Allah mengancam bagi orang-orang yang memerangi allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka

⁴⁹Departemen Agama RI , *Al Quran dan Terjemahan (QS Al Maidah 33)*, Jakarta : PT Syamil cipta Media, 2006, h.170

akan diberikan hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari Negara (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah dalam ayat ini.

2. Q.S Asy Syura Ayat : 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Makna ayat diatas adalah, Allah menegaskan bahwa pelaku kejahatan yang serupa. Namun demikian Allah melanjutkan siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Pada ayat ini meskipun Allah tegas dan gamblang menghukum bagi pelaku kejahatan, namun Allah sesungguhnya tidak ingin menunjukkan sikap tegasnya. Sehingga Allah menegaskan memaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dengan kejahatan yang serupa.

3. Q.S Al-Hujarat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumberbuku

- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- A.S Hikam Muhammad, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme dan Deradikalisasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016.
- Bakti Agus Surya, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press, 2014.
- BNPT, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, Jakarta: BNPT, 2012.
- C. Verhaak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Cet. Ke-IV : Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2006.
- Haedar Nasir, *Islam Syariat Edisi Revisi*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Jude kaye, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirbala*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kartodirjo Sarjono, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Kusrahmadai Dwi, *Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional*, Jakarta: PT. Erlangga, 2010.
- Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.

- Masduqi Irwan, *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Bandung: Mizan, 2012.
- Nasution, S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet. Ke-XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985
- P. Joko, Subagiyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004.
- Qadir Zuly, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta 1991.
- Rubaidi Ahmad, *Radikalisme Islam: Nahdatul Ulama' masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pusaka, 2007.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Sungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011.
- Zulqodir, *Radikalisasi Agama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Jurnal

- Abdul Munip, *Menangkal Radikalisme di Sekolah*, (Jurnal pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2
- Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropitas* (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9 Nomor 2 Desember 2015), Pp. 253f-268.
- Angga Natalia, *"Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologis Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia)"*, Jurnal Al-Adyan Vol. 11 No. 1
- Darmawati dan Thalib Abdullah, *Respon Siswa Madrasah (MAN) terhadap Radikalisme Agama di Makassar*, (Jurnal Sulesna, Vol. 10 No. 1, 2016
- Fathurrahman Rauf, *"Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam"*, Al-Adalah, Vol 12 No. 3

Greg Barton in *The Combating at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia*, Scott (ed) Southeast Asia Project 2009, h. 34-35

RadhaWidyaningsihdkk, *KerentananRadikalisme Agama di KalanganAnakMuda*, (Prosiding Seminar Nasionaldan Call For Paper: PengembanganSumberDayaPedesaandanKearifanLokalBerkelanjutan VII, November 2017), Pp. 1553-1587.

Rokhmad Abu,*PandanganKiaitentangDeradikalisasiPaham Islam Radikal di Kota Semarang*, Journal of Social Science and Religion, Ministry of Religious Affairs, Vol 21, No.1, Juni 2014.

Sahri, Radikalisme Islam di PerguruanTinggiPerspektifPolitik Islam (*Al-Daulah: JurnalHukumdanPerundangan Islam Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016*), Pp. 235-240.

Zulfadli, Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia (*JurnalAkademika Volume 22 Nomor 1 Januari 2017*), pp. 178-186.

Wawancara

WawancaradenganbapakIndra Jaya, S.Ag., M.A.P selakubidangurusan agama Islam kotabandarlampung, Padatanggal 05 November 2020.

WawancaradenganIbuDra.Hj. Muliawati, M.Ag.,selakuseksibinapahamkeagamaandanpenanganankonflikkotabandar Lampung, Padatanggal 5 November 2020.

Wawancara dengan bapak Drs. H. Luqmanul Hakim, M.M selakubidangpenerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat danWakaf kota bandar lampung, Padatanggal 05 November 2020.

Wawancara dengan ibu Alifah, S.Sos.I., selakuseksi kemitraan Umat, Publikasi Dakwahdan HBI kota Bandar Lampung, Padatanggal 05 November 2020.

Sumber On-Line

PengertianRadikalisme melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_\(sejarah\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_(sejarah)), diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Profil Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, diakses melalui <https://lampung.kemenag.go.id> , Pada tanggal 21 Desember 2020

Sejarah Kementrian Agama Kota Bandar Lampung, Diakses melalui <https://lampung.kemenag.go.id> , Pada tanggal 21 Desember 2020.

Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ,Diakses melalui <https://lampung.kemenag.go.id> , Pada tanggal 21 Desember 2020